TASHARRUF
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business | Page : 26 - 39
Vol. 01 No. 02 November 2020 | e-ISSN/p-ISSN : XXXX-XXXX/XXXX-XXX

Peranan Akuntansi Pertanggung Jawaban dalam Pengendalian Manajemen pada Bank Syariah

Rachmad Nor Firman,[1] Dikril Faizun[2]

[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan
Email : rahmadfirman2@gmail.com
[2] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan
Email : dikril.faizun@gmail.com

Submit : **15/8/2020** | Review : **11/09/2020 s.d 12/10/2020** | Publish : **9/11/2020**

Abstract
The form of line management accountability in Islamic banks is something that needs to be considered. Accountability needs to be pursued because this is to protect assets from theft, embezzlement, misuse or placement of assets in inappropriate locations. Thus, every line management of Islamic banks needs to use responsibility accounting as a control in management control. Accountability accounting in Islamic banking is present because of the decentralized form of responsibility and authority applied by the top management of the Islamic bank. effectiveness and efficiency as well as the state of the bank they lead. So that top management can make the right business decisions for the existence of Islamic banks in the future.

Keyword **:** *Responsibility Accounting, Decentralization and Line Management.*

Pendahuluan

Pertanggungjawaban di lakukan setiap individu, hisab harus di jalani setiap pribadi seseorang. Sabda Rasulullah SAW yang artinya: “setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap rakyatnya” dan dalam firman Allah SWT dalam Al quran surat Lukman ayat 33 yang artinya: “Hai, Manusia,bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari nanti yang (pada) hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak pula dapat menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji allah adalah benar,Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memberdayakanmu dalam menaati Allah.

Sehingga setiap perbuatan manusia pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian, bagaimana kaitannya pertanggungjawaban dalam system ekonomi Islam dengan system ekonomi konvensional, tentunya

dalam praktek ekonomi Islam perlu sekali banyak kajian, hal ini di karenakan system ekonomiIslam perlu sekali banyak kajian, hal ini dikarenakan system ekonomi Islam memberikan kebebasan individu dalam berekonomi, sehingga perlu penjelasan yang kompleks dalam penerapan pertanggungjawaban di dunia ekonomi konvensional. Dan juga, Islam mewajibkan para pengusaha untuk berbuat adil, jijur, dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (Falah) dan kehidupan yang baik hayatan thayyibah yang sangat menekankan ukhuwah, keadilan sosioekonomai, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.

Aplikasi pertanggungjawaban dalam akuntansi perbankan syariah, mutlajk diperlukan. Hal ini di karenakan peraturan Bank Indonesian yang mewajibkan setiap Bank harus memiliki seorang direktur kerpatuhan yang bertugas memastikan bahwa segala keputusan dan tindakan menejemen tidak melanggar ketentuan hukum dan peratran perundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, penulis tergugah untukmemberikan deskripsi singkat – dala tulisan ini – tentang peranan akuntansi pertanggungjawaban pada Bank syariah dalam pengendalian manajemen pada bank syariah agar tercapai efektifitas dan efisiensi. Dengan memberikan penjelasan berkenaan dengan penerapan akuntansi pertanggung jawaban dalam system bank syariah.

Metode

Metode penelitian diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan dalam artikel ini secara tepat dan ilmiah. Kajian dan penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal maupun dogmatik. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi dokumen. Dalam pelaksanaannya akan digunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundangundangan, keputusan atau penetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, dan pendapat juga para ahli atau sarjana di bidang hukum.

Results/Hasil

Manajemen Bank Syariah

Konsistensi dalam pencapaian tujuan manajemen haruslah didukung oleh proses perencanaan yang baik. Allah berfirman yng artinya: *"Wahai orang – orang yang bariman, bertaqwalah kepada Allah dan rencanakanlah masa depanmu. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Tahu atas apa – apa yang kalian perbuat"* (QS 59:18)

Suatu perencanaan yang baik dalam system bank syariah dilakukan nelalui berbagai proses kegiatan yang meliputi *forecasting, objective, policies, programmes, procedures dan budget.*

Kompleksnya pada bank syariah tersebut memberikan dampak dalam pengambilan keputusan manajemen dalam bank syariah, salah satunya dengan mendelegasikan tanggungjawab dan wewenang ke tingkat bawahan. Pendelegasian tanggungjawab dan wewenang ini bukanlah tanpa resiko, sehingga diperlukan alat control agar manajemen tetap berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang mengharuskannya suatu bank memiliki compliance director.

Pendelegasian tanggung jawab dan wewenang dalam tingkatan manajemen memunculkan berbagai tingkat tanggungjawab dan wewenang dalam unit kerja bank syariah. Sehingga, top manajemen bank syariah perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban agar didapatkan suatu kendali terhadap tanggung jawab dan wewenang pada tiap lini manajemen bank syariah. Upaya pengendalian yang dijalankan ini bagian dari system pengendalian manajemen dalam mengendalikan kegiatan manajemen lini bank syariah. Pelaksanaan pengendalian yang dilakukan melalui penerapan akutansi pertanggungjawaban adalah dengan cara mengelompokkan tanggungjawab dan wewenang serta menggariskan secara jelas hubungan satu bagian dengan bagian lainnya dalam manajemen bank syariah, dan juga dengan pertanggungjawaban dari masing- masing manajemen secara terinci.

Akutansi Pertanggungjawaban Bank Syariah

Konsep pertanggungjawaban merupaka bagian dari akutansi manajemen, dimana disajikan informasi akutansi yang menekankan pada pertanggungjawaban kegiatan-kegiatn tingkat manajemen lini bank syariah. Makin besar bank syariah

tersebut, maka makin rumit melakukan Pengendalian terhadap aktivitas manajemen lini bank syari'ah. Oleh karena itu banyak top manajemen bank syariah yang mulai mendesentralisasikan sebagian tanggungjawab dan wewengangnya pada manajemen lini bank syari'ah. Ini berarti sebagian kecil kekuasaan dipegang pimpinan, sedangkan sebagian besar kekuasaannya didelegasikan kepada bawahannya.

Ada 3 (tiga) alasan mengapa top manajemen perlu mendesentralisasikan tanggungjawab dan wewenangnya, yaitu:

1. Banyaknya pekerjaan seorang top manajemen, sehingga tidak memungkinkan untuk dikerjakan oleh top manajemen tersebut
2. Mengikutsertakan manajemen lini atau bawahan serta memberikan kesempata dalam menunjukkan pretasinya di perusahaan
3. Perlunya regenerasi sumber daya manusia untuk menggantikan top manajemen apabila top manajemen tidak lagi dalam perusahaan tersebut

Walaupun ada tanggungjawab yang didelegasikan oleh top manajemen kepada manajemen lini, namun otoritas top manajemen tetap dipertahankan. Sebagai konsekuensi dari orang yang menerima tanggungjawab, harus mempertanggung jawabkan wewenang tersebut kepada top manajemennya. Tanggungjawab ini menjadi suatu kewajiban untuk melaksanaka wewenang yang dilimpahkan, dimana terjadi pelimpahan suatu peranan perorangan atau dalam keolmpok untuk berperan dalam kegiatan.

Munculnya tanggungjawab merupakan akibat ari pelimpahan wewenang, dimana orang yang menerima wewenang mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan serangkaian tindakan, sesuai dengan batas wewenang yang diberikan, kemudian mempertangungjawabkan kepada top manajemen yang memberikan wewenang tersebut. Sehingga diperlukan system dalam upaya penilaian pertanggungjawaban terhadap pendelegasian tanggungjawab dan wewenang.

Akutansi pertanggungjawaban merupakan system atau alat yang dipakai pada suatu bank konvensional maupun bank syariah untuk mengendalikan biaya, karena dalam pertanggungjawaban biaya-biaya diakumulasikan dan dilaporkan dalam suatu pusat pertanggungjawaban tertentu. Pelaporanb akutansi secara

periodic mampu untuk meniolai tanggungjawab (kemampuan pendelegasian wewenng yang telah diberikan). Berikut pengertian akutansi Pertanggung jawaban, seperti yang dikemukakan oleh Hansen & Mowen: "Akutansi pertanggungjawaban adalah sustem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggung jawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat pertanggung jawaban mereka."

Sedangkan menurut L. M Samryn: "*Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akutansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pimpinan untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen.*"

Sedangkan menurut Mulyadi: *Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan palaporan biaya dan penghasilan dilakukan dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan dari biaya dan penghasilan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan.*"

Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Bank Syariah

Dari pengertian akuntansi pertanggungjawaban diatas, dapat ditafsirkan bahwa penerapan akuntansi pertanggung jawaban memiliki syarat-syarat dalam penerapannya:

1. Struktur Bank Syariah

   Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur bank syariah bank syariah harus menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang dan posisi yang jelas untuk setiap manajemen lini dari setiap tingkatan manajemen serta menggambarakan pembagian tugas yang jelas pula. Dimana manajemen banjk syariah tersusun sedemikian rupa sehingga tanggungjawab dan wewenang tiap pimpinan manajemen lini jelas.

2. Budget

   Dalam akuntansi pertenggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban atau setiap tingkatan manajemen lini harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan

   Gambaran rencana kerja para pimpinan manajemen lini yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kinerjanya.

3. Penggolongan Biaya

   Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan oleh top manajemen, maka hanya biaya- biaya terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan oleh top manajemen. Pemisahan biaya kedalam biaya terkendalikan1 dan biaya tak dikendalikan2 perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban bank syariah.

4. Sistem Akuntansi Biaya

   Oleh karena itu biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan pimpinan manajemen lini maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen lini yang terdapat dalam struktur bank syariah. Setiap tingkatan manajemen lini merupakan pisat biaya dan akan dibebani denngan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkandalikan dengan biaya tidak terkendalikan. Kode perkiraan diperlukan untuk mengklasifikasikan perkiraan- perkiraan baik dalam neraca maupun dalam laporan rugi laba.

5. Sistem Pelaporan Biaya

   Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap awal bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar total biaya bulan lalu, yang tercantum dalam kartu biaya. Atas dasar rekapitulasi biaya disajikan laporan pertanggungjawaban biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tringkata manajemen lini yang terendah disajikan jenis biaya, sedangkan untuk tingkatann top manajemen diatasnya disajikan total biaya, tiap pusat biaya yang dibawahnya ditambah dengan biaya-biaya yang terkendalikan dan terjadi dipusat biayanya sendiri

Didalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada suatu bank syariah, terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi tujuan dari akuntansi pertanggunjawaban itu sendiri. Menurut Robert N.

Anthony dan Roger H. Hermanson:
"Tujuan Akutansi pertanggungjawaban adalah membebani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkan".

Tujuan akutansi pertanggungjawaban tersebut dengan mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi atau untuk memperkirakan biaya-biaya tiap tingkatan manajemen di waktu yang akan datang. Adapun keuntungan dari penerapan Akutansi Pertanggungjawaban pada bank syariah adalah sumber daya manusia dalam bank syariah tersebut ikut berperran serta dalam mencapai tujuan dan sasaran bank syariah secara efektif dan efisien.

Pusat-pusat Pertanggungjawaban Bank Syariah

Pusat pertaggungjawaban adalah tingkatan manajemen lini pada sebuah bank syariah yang memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang tertentu untuk mencapai utujuan tertentu yang dipimpin oleh seorang pimpinan disetiap manajemen lini.

Pengertian pusat pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowen: *"Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang pimpinannya bertanggungjawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu."*

Pusat pertranggungjawaban merupakan suatu manajemen lini bank syariah yang dipimpin oleh seorang pimpinan yang mempunyai tanggungjawab dan wewenang atas aktivitas manajemen lini yang dipimpinannya. Pusat pertanggungjawaban pada lini bank syariah seperti seksi, segmen, departemen atau divisi.

Adanya suatu pusat pertanggungjawaban adalah untuk memenuhi satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen bank syariah tersebut. Tujuannya adalah mengimplemnetasikan rencana strategi top manajemen. Secara garis besar, pusat pertanggungjawaban dibedakan menjadi:

a. Pusat Biaya

   Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban dimana input diukur dalam satuan moneter dan output tidak diukur dalam satuan moneter. Secara umum ada dua macam pusat biaya, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan

b. Pusat Pendapatan

   Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban dimana output diukur dalam satuan moneter, tetapi tidak ada hubungannya dengan input. Karena pusat pendapatan adalah suatu divisi pemasaran yang tidak mempunyai tanggungjawab terhadap laba.

c. Pusat Laba

   Suatu pusat pertanggungjawaban yang diukur dalam ruang lingkup laba, yitu selisih antara pendapata dan pengeluaran

d. Pusat Investasi

   Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi pimpinan manajemen lininnya diukur atas dasar perbandingan antara laba dengan inventasi yang digunakan.

Peranan Akutansi Pertanggungjawaban dalam Pengendalian Manajemen pada Bank Syariah

Di dalam suatu bank syariah pada level middle-up akan sangat tidak mungkin sebagai top manajemen untuk mengendalikan seluruh kegiatan operasi bank syariahnya secara perorangan. Untuk itu diperlukan perangkat dan system yang dapat menjamin dan meyakinkan top manajemen bahwa sumber daya manusia pada banknya dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan keinginan top manajemennya. Dengan menggunakan akutansi pertanggung-jawaban dimana struktur organisasi dibentuk menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban maka seorang top manajemen tidak perlu untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan operasi bank syariah karena top manajemen telah mendelegasi sebagaian tanggungjawab dan wewenang.

Melalui informasi–informasi yang dihasilkan oleh akutansi pertanggungjawaban inilah top manajemen dapat mengendalikan kegiatan operasi bank syariahnya maupun memberikan tindakan-tindakan korektif atas pelaksanaan

kegiatan operasi yang menyimpang dari aturan atas standar yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah disusun pada tingkatan manajer lini merupakan suatu bentuk komitmen mengenai seberapa besar tanggungjawab dan wewenang atas pemakaian dan pengolahan sejumlah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh bank syariah tersebut yang dibebankan kepadanya. Sedangkan laporan realisasi anggaran akan menunjukkan sejauh mana prestasi manajer lini tersebut dalam melaksanakan komitmennya seperti yang telah dituangkan dalam anggarantipa-tiap manajer lini bank syariah tersebut.

Setelah laporan realisasi aggaran disusun oleh tiap-tiap manajemen lini bank syariah tersebut (pusat pertanggungjawaban), maka evaluasi dan analisis laporan realisasi anggaranb menjadi tugas top manaejmen. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara aggaran dengan laporan realisasi anggaran harus dianalisis sedemikian rupa sehingga tindakan-tindakan korektif dapat dilakukan secara efektif. Nformasi berupa hasil analisis inilah yang kemudia dapat meunjukkan keefesienan dan keefektifan penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada bank syariah dalam pengendalian manajemen.

Penetuan Kontrolabilits Biaya Bank Syariah

Dalam akutansi pertanggungjawaban, top manajemen berperan aktif menetapkan anggaran dari program kerja yang akan mana yang bertanggungjawab. Namun terjadinya biaya pada pusat pertanggungjawaban tidak selalu sebagai akibat dari keputusan yang diambil oleh pimpinan pusat pertabnggunjawaban yang bersangkutan. Karena tidak semua biaya yang terjadi pada pusat pertanggungjawaban dapat dikendalikan oleh pimpinan pusat pertanggungjawaban maka dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban harus dipisahkan anbtara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan.

Menurut LM Samryn biaya dapat digolongkan atas dasar pengaruh pimpinan terhadap biaya, penggolongannya adalah sebagai berikut :

1. Biaya Terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi leh seorang pimpinan tertentu dalam jangka waktu tertentu
2. Biaya Tak Terkebdalikan adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan atau pejabat tertentu berdasarkan wewenang yang dia

miliki atau tidk dapat dipengaruhi oleh seorang pejabat dalam jangka waktu tertentu.

Biaya-biaya yang sepenuhnya tidakdapat dikendalikan tidak akan memerlukan keputusan dan pertimbangan top manajemen karena hal itu tidak dapat mempengaruhi biaya karena itu biaya-biaya yangtidak dapat dikendalikan, diabaikan dalam evaluasi pimpinan, sebaliknya biaya-biaya yang dapat dikendalikan memberikan bukti tentang kinerja

Menejmen lini, sehingga memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan.

Dalam prateknya sulit menentukan biaya-biya mana yang akandibebankan dalam tanggungjawab manajer lini pda suatu pusat pertanggungjawababn. Untuk dapat memudahkan dalam memisahkan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali yang menjadi tanggungjawab top manajemen yang bersangkutan maka dipakai pedoman sebagai berikut :

a. Apabila seseorang memiliki tanggungjawa dan wewenang dala medapatkan ataui menggunakan produk tertentu, maka biaya yang berhubungan dengan pemakaian produk tersebut merupakan tanggungjawab oang bersangkutan
b. Apabila seseorang dapat dapat mempegaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakat sendiri, maka orang tersebut harus dibebani tanggungjawab atas biaya tersebut
c. Apabila seserang ditunjuk oleh pimpinan untuk membantu pejabat yang sesungguhnya yang bertanggungjawab atas semua elemen biaya tertentu, maka orang tersebut (meskipun secara langsung dapat mempengaruhi biaya melalui tindakannya sendiri) ikut bertanggungjawab terhada biaya tertentu bersama dengan pejabat yang dibntu tersebut dan yang bukan terjadi di perusahaan.

Laporan Pertaggungjawaban Bank Syariah

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan-laporan yang menerangkan hasil dari aplikasi konsep akutansi pertanggungjawaban yang

memegang peranan penting dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan pengawasan atas jalannya operasi bank syariah. Laporan petanggungjawaban merupakan ikhtisar hasil- hasil yang dicapai oleh tingkatan manajer pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas selama periode tertentu.

Laporan pertanggungjawaban harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana. Jika laporan tersebut terlalu kompleks maka top manajemen akan mengalami kesulitan dalam menganalisis kegiatan tiap-tiap manajemen lini bank syariah. Laporan pertanggungjawaban harus menyampaikan jumlah anggaran dan jumlah actual dari pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi harus menjadi perhatian yang penting. Komunikasi regular antara penyajian laporan dan pengguna laporan pertanggungjawaban harus selalu dilakukan untuk memastikan relevansi dari informasi yang disajikan tersebut. Sehingga bentuk pelanggaran-pelanggaran seperti employee fraud dapat dihindarkan.

Secara umum, tujuan dari laporan pertanggungjawaban yang diterapkan pada bank syariah adalah untuk memberikan informasi kepada para pimpinan pusat pertanggungjawaban tentang hasil-hasil pelaksanaan sautu pekerjaan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya dan memberikan motivasi kepada tiap tingkatan manajer untuk mengambil satu tindakan dalam upaya meningkatkan hasil. Ada lima prinsip dasar penyajian laporan:

1. Harus diterapkan konsep “pertanggung- jawaban”.
2. Sedapat mungkin harus diterapkan prinsip “pertanggungjawaban”.
3. Secara umum, angka-angka harus dapat diperbandingkan.
4. Sejauh yang dapat dilaksanakan, data harus semakin ringkas untuk jenjang pimpinan yang semakin tinggi.
5. Laporan-laporan pada umumnya harus mencakup komentar-komentar interpretative atau yang jelas dengan sendirinya.

Di samping lima prinsip di atas, ada berbagai faktor lain yang dapat membantu untuk membuat tanggapan atau penerimaan dari pembaca laporan yang lebih baik :

1. Laporan harus tepat waktu.
2. Laporan harus sederhana dan jelas.
3. Laporan harus dinyatakan dalam bahasa dan istilah yang dikenal oleh pimpinan yang akan memakainya.
4. Informasi harus dijadikan dalam urutan yang logis.
5. Laporan harus akurat.
6. Bentuk penyajian harus disesuaikan dengan pimpinan yang akan menggunakannya.
7. Selalu distandarisasikan, apabila mungkin.
8. Rancangan laporan harus mencerminkan sudut pandang pimpinan.
9. Laporan harus berguna.
10. Biaya penyiapan laporan harus dipertimbangkan.
11. Perhatian yang diberikan untuk penyiapan laporan harus sebanding dengan manfaatnya.

Setiap laporan harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap penyimpangan secara jelas ditonjolkan dan mendapat perhatian dari tiap-tiap manajer lini yang bertanggungjawab sehingga ia tidak perlu banyak membaca dan mencari dalam laporan tersebut untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Menrut Mulyadi, dasar-dasar yang melandasi penyusunan laporan pertanggungjawaban biaya, yaitu :

1. Jenjang terbawah yang diberi laporan ini adalah tingkatan manajer bagian.
2. Manjer jenjang terbawah diberi laporan pertanggungjawaban biaya yang berisi rincian realisasi biaya dibandingkan dengan anggaran biaya yang disusun.
3. Manajer jenjang di atasnya diberi laporan mengenai biaya pusat pertanggungjawaban sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh manajer-manajer yang berada di bawah wewenangnya, yang disajikan dalam bentuk perbandingan dengan anggaran biaya yang disusun oleh masing- masing manajer yang bersangkutan.
4. Semakin ke atas, laporan pertanggung- jawaban biaya disajikan semakin ringkas.

Pengendalian Internal Bank Syariah

Kelancaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak.9 Sehingga pengendalian internal perlu dilakukan oleh pimpinan dalam upayanya untuk melindungi aktiva dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat10. Sehingga didapatkan informasi transaksi yang akurat demi keberhasilan usaha. Penerapan pengendalian internal ini seringkali berjalan seiring, Hal ini disebabkan karyawan yang ingin menggelapkan aktiva juga perlu menutupi penipuan tersebut dengan menyesuaikan catatan akuntansi. Untuk memudahkan pengendalian internal ini, setiap bank besar selalu mengadakan special staff dengan program audit internal yang oleh Bank Indonesia disebut SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)

Kesimpulan

Akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian manajemen pada bank syariah merupakan sistem atau alat yang dipakai pada suatu lembaga perbankan untuk mengendalikan biaya, karena dalam akuntansi pertanggung-jawaban, biaya-biaya diakumulasikan dan dilaporkan dalam suatu pusat pertanggungjawaban tertentu.

Pelaporan akuntansi secara periodik mampu untuk menilai kemampuan pendelegasian wewenang yang telah diberikan, sehingga dapat dipenuhi tujuan akuntansi pertanggungjawaban.

Mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen di waktu yang akan dating. Sehingga individu dalam perusahaan bank syariah ikut berperan serta dalam mecapai tujuan dan sasaran bank syariah secara efektif dan efisien.

Referensi

Al-Mishari, Abdul Sami'. (2006). *Pilar-PilarEkonomi Islam.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Hansen dan Mowen. (2005). *ManagementAccounting.* Salemba Empat. Jakarta.

L.M. Samryn. (2001). *Akuntansi Pimpinanial Suatu Pengantar.*RajawaliPers.Jakarta.Malayu S.P Hasibun.(2001).MSDM.BumiAksara.Jakarta. Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*Penerbit Andi. Yogyakarta

Muhammad. (2004). M a n a j e m e n *DanaBankSyari'ah.* EKONISA. Yogyakarta Mulyadi. (1983). *Akuntansi Biaya.* BPFEUGM. Yogyakarta

Mulyadi. (1997). *Akuntansi Manajemen.* STIE BYKPN. Yogyakarta.

Robert N. Anthony dan Roger H.Hermanson. (2001). *SPM*. Salemba Empat. Jakarta.

Supriyanto.(2000).*Anggaran* Perusahaan. STIE BYKPN. Yogyakarta.Warren,Reeve,Fess.2005.Account ing. Salemba Empat. Jakarta